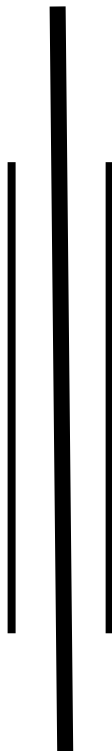


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKjIP)
SEMESTER I
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 /320.1/ SK /2025

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH SEMESTER I TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
 - bahwa dengan adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh Nomor 065/01312/2025 Tentang Teknis Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Banda Aceh dan OPD tahun 2025 Serta Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banda Aceh dan OPD Tahun 2026;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c, dan d maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 adalah untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 Juni 2025 M

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Semester I tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Diskominfo Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang telah tercantum di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2025.

Akhirnya Dokumen LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 di dalam pengerjaannya serta penyajiannya telah diupayakan untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi. Dokumen LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3. Aspek Strategis Organisasi..... | 2 |
| 1.4. Gambaran Umum | 3 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| 2.1. Rencana Strategis | 10 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran | 11 |
| 2.2.1.Tujuan | 11 |
| 2.2.2.Sasaran | 12 |
| 2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran..... | 14 |
| 2.4. Rencana Kinerja..... | 16 |
| 2.5. Perjanjian Kinerja | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 20 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 20 |
| 3.1.1..Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026..... | 21 |
| 3.1.2..Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja, Kendala dan Alternatif Solusi/ Upaya | 24 |
| 3.1.3..Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program Diskominfo..... | 31 |
| 3.1.4..Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya | 36 |
| 3.2. Realisasi Anggaran | 39 |

3.2.1..Capaian Diskominfotik Sepanjang Tahun 2024 42

3.2.2..Strategi/Langkah/Kebijakan Upaya Perbaikan Kinerja 43

BAB IV PENUTUP 45

LAMPIRAN

Ikhtisar Eksekutif

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 telah selesai disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2023-2026, Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Diskominfo Kota Banda Aceh selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya.

Dokumen LKjIP menguraikan pencapaian kinerja yang tertuang di dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis secara menyeluruh yang telah dilaksanakan pada Semester I tahun 2025 serta beberapa hal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya.

Simpulan LKjIP Diskominfo Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama;
2. Pencapaian sasaran strategis tersebut direncanakan akan dicapai dengan pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan, dimana pada pelaksanaannya terjadi pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkurang menjadi 5 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan pergeseran skala prioritas dan anggaran yang diberikan dapat terlaksana dengan baik;
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBD Kota Banda Aceh dengan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp 22.232.387.455,- dengan realisasi anggaran keuangan sebesar Rp 6.524.026.425, atau dengan presentase 29,34%;
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh pada semester I tahun 2025 menghadapi beberapa kendala yang dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan, dan
6. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan meskipun banyak permasalahan dan hambatan yang dialami.

Dokumen LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 ini merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini memerlukan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan LKjIP Diskominfo dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

Dalam rangka terselenggaranya sistem pemerintahan (*good governance*) Kota Banda Aceh yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Diskominfo adalah media atau dokumen akuntabilitas kinerja yang dipakai oleh Diskominfo untuk memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan juga sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfo kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2023-2026 dimana Renstra ini merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang berkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh berisi laporan tentang

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen LKjIP diharapkan dapat memberikan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tupoksi Diskominfo serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Beberapa tujuan utama dari LKjIP Diskominfo yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfo Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Diskominfo Banda Aceh di dalam melaksanakan tupoksinya secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfo Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Diskominfo Kota Banda Aceh atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh;
5. Sebagai media pertanggungjawaban kinerja Diskominfo, dan
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Diskominfo bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo serta mencari solusi pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Rumusan strategi Diskominfo menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan dari Diskominfo. Beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Diskominfo yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo.

1.4. Gambaran Umum

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banda Aceh dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfo Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan para *Stakeholder* lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi

kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan e-government.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yaitu melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

C. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan salah satu lembaga pemerintah kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 54 tanggal 20 Desember 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 - a) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - b) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
 - 2) Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - c) Bidang E-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - 2) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
 - d) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Hubungan Media, dan
 - 2) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
 - e) Bidang Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Survei Sektoral, dan
 - 2) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - g) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1., 1.2, 1.3, dan 1.4.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

| NO | Golongan | JUMLAH | | JUMLAH | Ket |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | Laki-laki | Perempuan | (orang) | |
| | PNS | | | | |
| 1 | IV/c | 1 | - | 1 | |
| 2 | IV/b | 1 | - | 1 | |
| 3 | IV/a | 6 | 2 | 8 | |
| 4 | III/d | 6 | 3 | 9 | |
| 5 | III/c | 2 | - | 2 | |
| 6 | III/b | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | III/a | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | II/d | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | II/c | - | - | - | |
| | Jumlah PNS | 22 | 9 | 31 | |
| | Non PNS | | | | |
| 9 | Peg. Kontrak | 17 | 8 | 25 | |
| | Jumlah Non PNS | 17 | 8 | 25 | |
| | JML PNS + NON PNS | 39 | 17 | 56 | |

(Sumber: Subbagian Kepegawaian, Umum dan Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2025)

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfo Berdasarkan Jabatan/Eselonering

| No. | Jabatan | Eselonering | Jumlah orang |
|-----|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Kepala Dinas | II. b | 1 |
| 2 | Sekretaris | III. a | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | III. b | 4 |
| 4 | Jabatan Fungsional | IV. a | 8 |
| 5 | Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset | IV. a | 1 |
| 6 | Kepala Tata Usaha (UPTD) | IV. b | 0 |
| | Jumlah | | 15 |

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh,Tahun 2025)

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut Tingkat Pendidikan Formal

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah orang |
|-----|--------------------|--------------|
| 1 | S 2 | 6 |
| 2 | S 1 | 20 |
| 3 | D IV | 0 |
| 3 | D III | 3 |
| 4 | SLTA/Sederajat | 2 |
| 5 | SLTP/Sederajat | 0 |
| 6 | SD/Sederajat | - |
| | Jumlah | 31 |

(Sumber: Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh,Tahun 2025)

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

| No. | Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural | Jumlah orang |
|--------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | S pamen / PIM – II | 1 |
| 2 | S pama / PIM – III | 4 |
| 3 | Adum / PIM – IV | 10 |
| Jumlah | | 15 |

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh , Tahun 2025)

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2025 pada dasarnya berfungsi untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banda Aceh pada sampai dengan akhir Semester I Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut kemudian dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja Diskominfo dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan sebagai berikut.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Tujuan dan Sasaran

- 2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Rencana Kinerja
- 2.5. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfo akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis disusun untuk menindaklanjuti program RPD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD jangka menengah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra SKPD terkait dengan sasaran RPD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rumusan strategi Diskominfo menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Diskominfo ingin menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* yang menerima layanan yang diberikan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfo adalah :

1. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib

administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis *Information Technology* (IT), dan

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terfokus di dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Diskominfo. Kebijakan yang dilakukan Diskominfo adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

2.2.1. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektorial yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023-2026

| TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | | KRITERIA PENILAIAN | KONDISI AWAL (2022) | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | KONDISI AKHIR (2026) | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|---|--|---|---------------------|--|------|------|------|----------------------|---|------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh | Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Laporan Tahunan |
| Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik | 1.1.1 | Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 33% | BIDANG STATISTIK | Laporan Tahunan |
| | 1.1.2 | Persentase website OPD yang aktif | $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$ | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 88% | BIDANG PIP & BIDANG HUBMED dan PENYELENGGARAAN SMART CITY | Laporan Bulanan dan Tahunan |
| | 1.1.3 | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$ | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 63% | BIDANG E-GOV dan BIDANG HUBMED & PENYELENGGARAAN SMART CITY | Laporan Triwulan dan Tahunan |

(Renstra dan IKU Diskominfotik 2023-2026)

2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diantaranya melalui satu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan dan dirincikan lagi ke dalam beberapa sub kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

3.1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda

3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

3.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

3.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

3.1.5. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

4.1.2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.4. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2025 yang

memuat sasaran strategis, indikator tujuan dan sasaran kinerja serta target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang akan dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2025 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo (IKU) Tahun 2025

| TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | | TARGET KINERJA (%) |
|--|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh | Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi | | 100 |
| Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik | 1.1.1 | Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | 31 |
| | 1.1.2 | Persentase website OPD yang aktif | 86 |
| | 1.1.3 | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | 61 |

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah beban kerja kepada atasan langsung atau bisa juga merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi | Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | 31% |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik | Persentase website OPD yang aktif | 86% |
| | | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | 61% |

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|----|---|--|---|---------------|
| 1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Relasi Media | 688.899.913 |
| | | | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | 30.935.900 |
| | | | Pelayanan Informasi Publik | 60.000.000 |
| | | | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik | 55.888.307 |
| | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 58.371.382 |
| | | | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | 15.000.000 |
| | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | 15.000.000 |
| 2 | Pengelolaan Aplikasi Informatika | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | 46.742.000 |
| | | | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | 38.150.919 |
| | | | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | 42.987.367 |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------|
| | | | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 153.115.626 |
| | | | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | 100.000.000 |
| | | | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | 76.204.000 |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | - |
| 3 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | - |
| | | | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | 100.000.000 |
| 4 | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 7.076.730 |
| | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Diskominfo diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2025. Capaian kinerja Diskominfo pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
|----|--|--|------------|--------|-----------|------------|
| 1 | Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi | Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | Persentase | 31% | 15,5% | 50% |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik | Persentase website OPD yang aktif | Persentase | 86% | 43% | 50% |
| | | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | Persentase | 61% | 30,5% | 50% |

Pada Tabel 3.1 bisa dilihat bahwa pada Semester I tahun 2025 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo, dimana pada sasaran strategis pertama terdapat satu indikator kinerja yang mencapai realisasi target 50%. Pada sasaran strategis yang kedua terdapat dua indikator kinerja dimana semua indikator tersebut mencapai realisasi target 50%.

3.1.1. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Renstra 2023-2026

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan satu indikator yang harus terpenuhi yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025
Sasaran 1

| No | Indikator Sasaran | Baseline Tahun 2018 | Capaian Tahun 2024 | Semester I 2025 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d Semester I 2025 terhadap Target 2026 (%) |
|----|--|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Persentase Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | 5% | 29% | 31% | 15,5% | 50% | 33% | 47,0% |

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada Semester I tahun 2025 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 15,5%.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebesar 5%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 sendiri Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 29% dimana capaian ini sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara itu capaian target kinerja pada Semester I tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 15,5%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Data Statistik

Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan Semester I tahun 2025 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 47%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral oleh Diskominfo. Pada tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya. Diskominfo harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu terbaru (*update*) atau tepat waktu serta terus meningkatkan sinergitas dengan para *stakeholder* data statistik sektoral, baik di dalam lingkungan OPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Universitas yang ada di Kota Banda Aceh dan *stakeholder* lainnya.

Sementara itu untuk mencapai target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu didukung oleh 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dimana tingkat realisasi anggarannya tidak mencapai target atau 0%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif dan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Sasaran 2

| No | Indikator Sasaran | Baseline Tahun 2018 | Capaian Tahun 2024 | Semester I 2025 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d Semester I 2025 terhadap Target 2026 (%) |
|----|--|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Target | Realisasi | Persentase Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase website OPD yang aktif | 65% | 84% | 86% | 43% | 50% | 88% | 48,9% |
| 2 | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | 0% | 59% | 61% | 30,5% | 50% | 63% | 48,4% |

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 2 (dua) indikator dimana kedua indikator ini semuanya mencapai target yang ditetapkan. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Semester I Tahun 2025 dimana angka realisasi pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 43% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Website OPD yang Aktif adalah sebesar 65%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 adalah sebanyak 84% dan sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 42%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan Semester I tahun 2025 sudah mencapai angka

48,9%. Tercapainya target kinerja pada Indikator Sasaran Persentase Website OPD yang Aktif dikarenakan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang aktif di dalam memberikan dan melakukan update berita dibandingkan dengan jumlah seluruh website SKPD yang dikelola pada lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh sudah mencapai target yang diharapkan dan dapat dipantau secara langsung oleh publik melalui aplikasi sinergi di alamat: sinergi.bandaacehkota.go.id.

2. Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Semester I Tahun 2025 yaitu sebesar 61% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 30,5%. Angka ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang telah ditetapkan. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$. Pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa *baseline* perhitungan indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 0%. Untuk capaian target kinerja pada tahun 2024 sendiri Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebanyak 59% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Hal ini disebabkan oleh adanya Revisi pada Renstra dan IKU Diskominfo sehingga Target Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government ini baru dilakukan pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2026, capaian target kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sampai dengan Semester I tahun 2025 sudah mencapai angka 48,4%.

3.1.2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Alternatif Solusi/Upaya

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dari Diskominfo untuk target kinerja pada Semester I tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada Semester I tahun 2025 target kinerja pada Indikator Kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah sebanyak 15,5%. Berdasarkan dari pencapaian target kinerja dari tahun 2018, sampai dengan tahun 2024, target yang diharapkan pada tahun 2025 masih sesuai dengan Renstra Diskominfo tahun 2023-2026. Pada tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik sebagai penanggungjawabnya.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah :

- Belum bakunya bentuk data statistik sektoral yang digunakan di lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih terjadinya benturan penyediaan data sektoral yang dibutuhkan diantara OPD yang menjadi sumber atau produsen data dengan Diskominfo Kota Banda Aceh sebagai pengelola data;
- Kebijakan refocusing anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat pada Pemerintah Kota Banda Aceh semenjak tahun 2021 memaksa dibutuhkan adanya kebijakan penyesuaian dan pengalihan prioritas anggaran yang diberikan kepada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu dihapus dan dialihkan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas;
- Pemanfaatan data statistik masih belum maksimal dikarenakan Surat Keputusan Kepala Bappeda No. 60 Tahun 2024 tidak melibatkan Diskominfo sebagai pengguna data untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, atau penyusunan kebijakan

sehingga menyebabkan pengelolaan kegiatan Statistik masih kurang maksimal karena belum ada aturan baku bagi OPD untuk melaporkan kegiatan statistik kepada BPS;

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase Data Statistik Sektor Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah :

- Diskominfo tetap berupaya maksimal meskipun tidak tersedianya anggaran dengan melakukan beberapa strategi seperti menjalin kerja sama intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, Universitas Negeri dan Swasta di Kota Banda Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, Politeknik Aceh dan Universitas Lainnya dan *stakeholder* lainnya;
- Diskominfo juga terus berupaya melakukan pembakuan bentuk dataset statistik sektoral yang digunakan, menyusun konsep dasar, metodologi, dan tata kelola satu data, terus berupaya melakukan pembentukan dan penguatan kelembagaan forum satu data serta terus melakukan proses integrasi data dari seluruh *stakeholder* Diskominfo Kota Banda Aceh;
- Diskominfo terus melakukan penguatan implementasi Satu Data Indonesia dengan memastikan penerapan standar metadata statistik dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh OPD, mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021;
- Meningkatkan pengawasan dan pelaporan untuk memastikan kesesuaian standar data dimana hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas data statistik;
- Diskominfo terus berkoordinasi dengan BPS terkait dengan pematangan kualitas rencana kerja untuk meningkatkan aktualitas data, terutama melalui pemantauan jadwal diseminasi, melakukan mekanisme verifikasi dan validasi keterbandingan data di seluruh OPD guna memastikan konsistensi;

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Persentase Website OPD yang Aktif

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian target kinerja pada Semester I tahun 2025 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 43%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2026, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2025 sudah mencapai angka 48,9%. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggungjawab. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya agar semua OPD yang memiliki situs/website dan mengaktifkan situs/website tersebut sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui situs/website OPD yang aktif dapat dinilai keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan *city branding* kepada masyarakat luas, bukan hanya level kota, namun juga pastinya akan menyentuh level provinsi, nasional bahkan dunia internasional. OPD juga mulai melirik pemanfaatan media sosial yang memiliki segmentasi pembaca/pengikut (*followers*) yang menjangkau kaum muda secara luas.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan di dalam mencapai target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif adalah :

- Beragamnya tingkat respon keaktifan OPD dalam mengupdate website yang dimiliki;
- Masih terdapat OPD yang tidak atau kurang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas di dalam melakukan updating berita atau informasi ke dalam website yang dimiliki;
- Terbatas dan kurang menariknya berita dan informasi yang dihasilkan dan disebarkan melalui media informasi dimana hal ini disebabkan karena di dalam produksi berita atau informasi belum sesuai dengan standar penulisan berita atau informasi,

serta hanya berorientasi dengan jumlah yang diproduksi bukan kualitas yang dihasilkan, dan

- Kualitas dan konsistensi data yang masih belum sempurna dimana hal ini disebabkan oleh belum semua OPD memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menyajikan berita dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif adalah:

- Diskominfotik terus berupaya untuk mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Selain itu Diskominfotik terus berupaya memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website OPD sehingga jumlah persentase website OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik;
- Diskominfotik terus melakukan koordinasi dan mengharapkan inisiasi serta keaktifan dari setiap OPD di Kota Banda Aceh di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website OPD, dan
- Diskominfotik terus melakukan pelatihan baik secara langsung, luring maupun daring kepada seluruh personil OPD di dalam meningkatkan kualitas dan pemahaman di dalam melakukan produksi, updating dan pengelolaan berita dan informasi di dalam website OPD.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Kendala dan Upaya yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan Layanan E-Government

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian indikator Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Semester I Tahun 2025

yaitu sebesar 30,5%. Tercapainya target kinerja pada indikator sasaran Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan dikarenakan perbandingan dari mampu dilayaninya jumlah OPD yang memiliki aplikasi dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh oleh Diskominfotik. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab. Dikarenakan pada kriteria indikator kinerja Cakupan Layanan E-Government yang dikelola oleh Diskominfotik menyatakan bahwa semua aplikasi yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh melalui setiap OPD, baik aplikasi khusus maupun publik, wajib dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh melalui Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City. Oleh karena itu diharapkan Diskominfotik mampu untuk terus mengelola dan melayani setiap OPD yang memiliki aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Diskominfotik selain mengelola semua aplikasi pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu melengkapi dokumen pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE, dokumen arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Banda Aceh, dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), aspek manajemen SPBE dan aspek Audit TIK yang dimiliki serta dokumen Proses Bisnis aplikasi-aplikasi yang digunakan pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan komponen penilaian oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap setiap indikator SPBE, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE, penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE dengan memaksimalkan peran Tim

Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satu aspek lainnya di dalam pencapaian Cakupan Layanan E-Government adalah proses integrasi aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Diharapkan kedepannya Diskominfo mampu untuk terus bekerja sama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam pendataan dan survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga proses integrasi keseluruhan aplikasi yang ada bisa dilakukan dengan baik sehingga target Persentase Cakupan Layanan E-Government dapat tercapai.

1. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun kendala dan hambatan di dalam mencapai target kinerja Persentase Cakupan Layanan E-Government adalah :

- Diskominfo masih memiliki kelemahan di dalam jumlah SDM terutama tenaga ahli IT (*programmer, networking, IT Support, dll*) yang dibutuhkan serta anggaran yang diberikan kepada Diskominfo belum memadai;
- Masih banyaknya perangkat kerja IT yang dimiliki oleh Diskominfo belum dilakukan perawatan sehingga kualitas kinerja masih belum maksimal;
- Belum semua OPD memiliki data elektronik yang bisa diintegrasikan sehingga di dalam pemanfaatannya masih menggunakan data manual yang tidak sesuai dengan penilaian SPBE;
- Pembangunan aplikasi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh masih banyak yang tidak mempertimbangkan proses bisnis dan peta rencana SPBE yang terintegrasi sehingga menimbulkan redundansi fungsi aplikasi yang dibangun dan tidak bisa dilakukan integrasi;

2. Upaya yang Dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja Persentase Cakupan Layanan E-Government adalah :

- Melakukan permintaan penambahan SDM Ahli di posisi-posisi yang masih belum terisi, penambahan anggaran untuk melakukan peremajaan dan pemeliharaan perangkat yang dimiliki serta memperbanyak bimtek/diklat/pelatihan kepada SDM yang dimiliki;
- Melakukan rapat rencana tindak lanjut implementasi arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran Kota Banda Aceh bersama Bapedda dan BPPK dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- Membuat dokumen resmi (Nota Kesepahaman/Surat Edaran/Surat Keputusan) terkait keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga pelaksanaan SPBE menjadi salah satu program prioritas daerah, dan
- Melakukan evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang dipimpin oleh Bappeda secara berkala untuk memastikan ketercapaian target SPBE.

3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program Diskominfo

Usaha Diskominfo untuk mencapai target kinerja pada sasaran Tersedianya data statistik Sektor yang berkualitas dan terintegrasi dan Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik pada Semester I Tahun 2025 membutuhkan performa kinerja yang mumpuni (seperti yang bisa dilihat pada sub bab sebelumnya) dan didukung oleh capaian realisasi anggaran 4 (empat) program pendukung utama yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo dan memiliki 6 (enam) kegiatan yang kemudian dirincikan dengan sub-sub kegiatan. Salah satu alat ukur di dalam mengukur capaian keberhasilan performa kinerja tersebut adalah dengan menggunakan Analisis Efisiensi.

Analisis efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumberdaya/biaya untuk mencapai hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dijalankan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1(satu) maka akan terjadi efisiensi
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu) maka efisiensi tidak tercapai

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya/Anggaran Terhadap Program yang telah dilaksanakan pada Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6.

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 1

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kinerja Semester I Tahun 2025 | | Persentase Capaian Terhadap Target | Anggaran Tahun 2025 | | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA |
|---|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|--|----------------|--|
| | | Target (Renstra) | Capaian | | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Indikator 1: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | Persentase | 31 | 15,5 | 50 | 38.806.700 | - | - |
| Persentase Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 50 | Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran | | 0 |
| Tingkat Efisiensi = | | | | | 0 | | |

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu tidak dapat dianalisis dikarenakan oleh program ini tidak memiliki realisasi anggaran namun indikator tetap dilaksanakan dikarenakan indikator ini penting untuk mengetahui Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu.

Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 2

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kinerja Semester I Tahun 2025 | | Persentase Capaian Terhadap Target | Anggaran Tahun 2025 | | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA |
|---|------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|--|----------------|--|
| | | Target (Renstra) | Capaian | | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Indikator 2 : Persentase website OPD yang aktif | Persentase | 86 | 43 | 50 | 11.301.299.400 | 3.021.183.000 | 26,73 |
| Persentase Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 50 | Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran | | 26,73 |
| Tingkat Efisiensi = | | | | | 1,87 | | |

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Persentase website OPD yang aktif tercapai dengan tingkat efisiensi 1,87%.

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Anggaran Program Terhadap Capaian Pendukung IKU 3

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kinerja Tahun 2025 | | Persentase Capaian Terhadap Target | Anggaran Tahun 2025 | | Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DPPA |
|--|------------|--------------------|---------|------------------------------------|--|----------------|--|
| | | Target (Renstra) | Capaian | | Pagu DPPA (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Indikator 3 : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | Persentase | 61 | 30,5 | 50 | 4.123.702.100 | 97.245.300 | 2,36 |
| Persentase Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 50 | Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran | | 2,36 |
| Tingkat Efisiensi = | | | | | 21,20 | | |

Pada pelaksanaan program yang mendukung capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan tercapai dengan tingkat efisiensi 21,20%.

3.1.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan Tujuan dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yaitu Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, dimana Diskominfo harus mampu untuk terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut Diskominfo harus terus berkembang, semakin melengkapi dan memperbaharui diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja tinggi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diskominfo Kota Banda Aceh pada Semester I tahun 2025 memiliki beberapa tugas dan target yang harus dicapai seperti:

1. Melanjutkan kesinambungan upaya Kota Banda Aceh yang telah terpilih sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayanan Smart City. Salah satu yang utama adalah Diskominfo terus memperbaiki kualitas fasilitas *command center* yang telah dibangun pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022. Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung keterwujudan konsep Smart City sebagai upaya perbaikan pelayanan publik pada Kota Banda Aceh. *Command center* yang juga sebagai ruang pusat kontrol pemantau berfungsi sebagai pusat kontrol data internal yang bisa memonitor langsung keadaan Kota Banda Aceh melalui kamera pemantau atau CCTV yang terpasang pada titik-titik vital. Selain itu fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat kontrol komando monitor data-data, aplikasi-aplikasi dan juga sistem terintegrasi yang berada pada pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfo terus berupaya untuk melaksanakan Dokumen atau *Master Plan* Smart City sebagai menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City, melakukan koordinasi dan elaborasi serta terus melakukan upaya-upaya kesinambungan seperti *Forum Group Discussion* (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan OPD-OPD terkait dengan

kesinambungan upaya Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan Smart City.

2. Meningkatkan indeks pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh yang berada di dalam Cakupan Layanan E-Government Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Memperbaiki dan meningkatkan pemenuhan data statistik sektoral pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Diskominfo terus melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral serta untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
4. Terus meningkatkan kualitas sistem dan diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berada pada wewenang Pemerintah Kota Banda Aceh yang menjadi tugas Diskominfo. Selain itu diskominfo selalu berupaya menjaga predikat Kota Banda Aceh sebagai Kota dengan Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan pengelolaan informasi publik dan juga sistem pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!.

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Semester I tahun 2025, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo seperti :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam pengerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan dikarenakan oleh kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat ;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;

5. Belum memadainya fasilitas diseminasi (penyebarluasan) informasi publik;
6. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki, dan
7. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada tahun kedepannya adalah :

1. Memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo;
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pembinaan dan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT dimana tentunya tetap menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
5. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
6. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
7. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
8. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi, dan
10. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Diskominfofik pada Semester I Tahun 2025 adalah sebesar 29,34% dari total anggaran yang dialokasikan berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Diskominfofik Kota Banda Aceh. Realisasi Keuangan Diskominfofik Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Diskominfofik Semester I Tahun 2025

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Alokasi Anggaran (DPPA) | Realisasi Anggaran | % |
|-----|---|--|-------------------------|--------------------|-------|
| I | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | 6.728.992.655 | 3.405.598.125 | 50,61 |
| | A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.027.100 | 3.098.800 | 22,09 |
| | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.027.100 | 3.098.800 | - |
| | | 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | - |
| | B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.969.934.855 | 2.420.363.922 | 60,97 |
| | | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.969.934.855 | 2.420.363.922 | 60,97 |
| | | 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | - |
| | C | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - |
| | | 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | - |
| | D | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 69.551.300 | 15.542.097 | 22,35 |
| | | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.923.100 | 1.155.900 | 39,54 |
| | | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.914.500 | 4.615.300 | 38,74 |
| | | 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.713.700 | 2.486.900 | 52,76 |
| | | 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000 | 7.283.997 | 14,57 |
| | E | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 200.000.000 | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|----------------|---------------|-------|
| | | 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | - |
| | | 2 | Pengadaan Mebel | - | - | - |
| | | 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 200.000.000 | - | - |
| | F | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 2.202.196.800 | 861.943.406 | 39,14 |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 972.038.000 | 259.722.262 | 26,72 |
| | | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.230.158.800 | 602.221.144 | 48,95 |
| | G | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 273.282.600 | 104.649.900 | 38,29 |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 234.360.600 | 86.700.400 | 36,99 |
| | | 2 | Pemeliharaan Mebel | - | - | - |
| | | 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38.922.000 | 17.949.500 | 46,12 |
| | | 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | II | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | | 11.301.299.400 | 3.021.183.000 | 26,73 |
| | A | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 11.301.299.400 | 3.021.183.000 | 26,73 |
| | | 1 | Relasi Media | 7.974.525.400 | 2.869.415.000 | 35,98 |
| | | 2 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | - | - | - |
| | | 3 | Pelayanan Informasi Publik | 34.491.900 | 7.884.000 | 22,86 |
| | | 4 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik | 29.998.800 | 7.884.000 | 26,28 |
| | | 5 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 3.262.283.300 | 136.000.000 | 4,17 |
| | | 6 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | - | - | - |
| | | 7 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | - | - | - |
| | III | Pengelolaan Aplikasi Informatika | | 4.123.702.100 | 97.245.300 | 2,36 |
| | A | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 4.123.702.100 | 97.245.300 | 2,36 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | 50.236.800 | - | - |
| | | 2 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | 244.133.300 | 65.983.300 | 27,03 |
| | | 3 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | 183.850.000 | 15.500.000 | 8,43 |
| | | 4 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 3.645.482.000 | 15.762.000 | 0,43 |
| | | 5 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | - |
| | | 6 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | - | - | - |
| | | 7 | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | - | - | - |
| IV | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | 38.806.700 | - | - |
| | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 38.806.700 | - | - |
| | A | 1 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | - | - | - |
| | | 2 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | 38.806.700 | - | - |
| V | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | | | 39.586.600 | - | - |
| | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 39.586.600 | - | - |
| | A | 1 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 39.586.600 | - | - |
| | B | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - |
| | | 1 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - |
| TOTAL | | | | 22.232.387.455 | 6.524.026.425 | 29,34 |

Berdasarkan Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Diskominfo Semester I Tahun 2025 mencapai angka Rp 6.524.026.425,- atau sebesar 29,34% dari anggaran yang diberikan yaitu Rp 22.232.387.455,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan berdasarkan Renstra 2023-2026 dan sudah masuk di dalam Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfo namun tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Semester I tahun 2025. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Serapan dan realisasi keuangan terbesar berada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai angka dan presentase Rp 3.405.598.125,- atau 50,61%. Sementara itu serapan dan realisasi keuangan terkecil berada pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang hanya sebanyak Rp 97.245.300,- atau 2,36%. Sementara itu anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi belum dilakukan penganggaran dana melalui pembukaan SPD berdasarkan kebijakan *refocusing* dan SPD ketat yang menyebabkan pelaksanaan dan realisasi anggaran belum bisa dilakukan dan diharapkan bisa dilakukan pada Semester II Tahun 2025.

3.2.1. Capaian Diskominfo pada Semester I Tahun 2025

Diskominfo dalam pelaksanaan tupoksinya pada Semester I tahun 2025 telah berhasil dalam meraih beberapa prestasi yang membanggakan seperti:

1. Bidang Statistik

Bidang Statistik telah berhasil membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan BPS dengan nilai 1,83 pada tahun 2023 menjadi 2,57 pada tahun 2024

2. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat telah berhasil membantu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh meraih peringkat pertama kepatuhan pelaporan pajak tingkat SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan pencapaian SAKIP level Pemerintah Kota dengan Nilai Hasil Evaluasi 86,8 dan Tingkat Akuntabilitas Kinerja “A”.

3.2.2. Strategi/Langkah/Kebijakan Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun banyak hambatan, kesulitan baik dari sisi teknis maupun anggaran yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada Semester I tahun 2025, usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Diskominfo Kota Banda Aceh. Beberapa strategi, langkah dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut diantara lain :

1. Menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;
2. Perumusan, penyusunan, penataan, penetapan, pembakuan dan evaluasi kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo;
3. Mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat;
4. Melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas dengan optimalisasi anggaran yang diberikan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (BPS, Universitas maupun *stakeholder* lainnya) sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, penguatan implementasi satu data indonesia, peningkatan kualitas data, perbaikan proses bisnis statistik, pengelolaan kelembagaan dengan asas profesionalisme, pemanfaatan statistik nasional dan *big data* dan penguatan tata kelola statistik;
6. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
7. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo secara berkesinambungan;

9. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi;
10. Terus melakukan sosialisasi dan *transfer knowledge* terkait dengan pelaksanaan kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang harus memuat aturan yang lengkap mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE) serta terintegrasi antar pemerintah daerah, dan dijadikan sebagai dasar perencanaan dan belanja SPBE dan kebijakan internal harus direviu dan dievaluasi secara periodik kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
11. Memaksimalkan kordinasi antara Admin Koordinator dan Pejabat Penghubung (OPD) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta mengupayakan ketersediaan anggaran untuk dapat menggelar Rapat Teknis seluruh tim teknis pengelola layanan pengaduan masyarakat secara rutin dan simultan;
12. Optimalisasi pencapaian target dengan cara menerbitkan secara rutin Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh tentang Update Data dan Berita Website OPD yang didistribusikan ke seluruh OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, pelaksanaan monitoring, pengelolaan dan peningkatan koordinasi dengan SKPD/OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga informasi publik dapat rutin diperbaharui atau diupdate dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya tercapai dan diharapkan semakin naik, dan
13. Menerapkan secara rutin mekanisme *reward dan punishment* yang telah ditetapkan oleh Kepala Diskominfotik sehingga seluruh ASN Diskominfotik mendapatkan motivasi dan semangat lebih di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga linear dengan capaian kinerja Diskominfotik.

Diharapkan dengan adanya usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, tupoksi, sasaran strategis dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, kinerja dan performansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Semester I Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfo Kota Banda Aceh serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo pada bidang urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Renstra Diskominfo tahun 2023-2026 sebagai pendukung pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Secara keseluruhan pelaksanaan dan pencapaian kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh pada Semester I Tahun 2025 masih rendah. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo pada Semester I Tahun 2025 baru mencapai angka 29,34% dimana total anggaran yang diberikan adalah Rp 22.232.387.455,- dan total realisasi anggaran mencapai Rp 6.524.026.425,-. Terdapat beberapa program, kegiatan atau sub kegiatan Diskominfo yang telah direncanakan untuk dilakukan berdasarkan Renstra dan Renja Diskominfo tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Semester I tahun 2025. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang membuat adanya pengalihan anggaran kepada program, kegiatan atau sub kegiatan prioritas.

Langkah-langkah, strategi, dan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, melakukan perumusan, penyusunan, penataan, penetapan dan pembakuan kebijakan, rencana induk, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo, mengalokasikan anggaran dan dana kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh

Diskominfo, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga komunikasi lintas sektoral dapat terus terjalin sehingga menjadikan kerjasama SKPD semakin meningkat, meningkatkan dan memaksimalkan kualitas SDM yang dimiliki melalui pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya, sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo secara berkesinambungan, melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral, melakukan penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi TIK dan informasi publik serta data sektoral yang berkualitas, memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi, melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Demikian LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh Semester I Tahun 2025 ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja instansi dan organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 16 Juni 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


Alizar, S.Ag., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19691117 200112 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

| No | Sasaran | | | Program | | | Kegiatan | | | Sub Kegiatan | | | | | | Ket |
|----|---------|-------------------|--------|---|---|--------|--|---|--------|--|-------------------|---|--|-------------|---------------|-----|
| | Uraian | Indikator Sasaran | Target | Uraian | Indikator Kinerja | Target | Uraian | Indikator Kinerja | Target | Uraian | Indikator Kinerja | | | Satuan | Target | |
| 1 | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah | 100% | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 100% | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 4.855.653.265 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 33 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 2.094.810.000 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 201.657.103 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 60 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 5.861.356 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 6 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 15.495.747 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |
| | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 100.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 20 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran | % | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------------|-----|---|---|------|--|--|------|---|---|
| | | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) - Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Mebel | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) - Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 13 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 133.319.890 Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 10 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 698.609.113 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 51.925.330 Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 90.487.100 Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Mebel | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) - Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 13 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 158.126.948 Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 58 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 30.000.000 Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1 Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 |
| 8.435.945.852 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik | Persentase website OPD yang aktif | 86% | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat | 100% | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat | 100% | Relasi Media | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 688.899.913 Keluaran : Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media Laporan 5 Hasil : Persentase website OPD yang aktif % 86 |
| | | | | | | | | | | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 30.935.900 Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo Komunitas 1 Hasil : Persentase website OPD yang aktif % 86 |
| | | | | | | | | | | | Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan (Rp) 60.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------------------------------|--|------|--|---|------|---|----------|---|---|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | Pelayanan Informasi Publik | Keluaran | : | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan | Permohonan | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | |
| | | | | | | | | | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 55.888.307 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah | Rekomendasi | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | |
| | | | | | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 58.371.382 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis | Media | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | |
| | | | | | | | | | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 15.000.000 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun | Dokumen | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | |
| | | | | | | | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 15.000.000 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan | Orang | 45 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Persentase website OPD yang aktif | % | 86 | |
| | | | | | | | | | 924.095.502 | | | | | | |
| | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | 61% | Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika | 100% | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | persentase layanan e-government yang dikelola | 100% | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 46.742.000 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda | Laporan | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 38.150.919 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 42.987.367 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah | Aplikasi | 3 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 153.115.626 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Perangkat Daerah | 44 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Masukan | : | Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 100.000.000 | |
| | | | | | | | | | | Keluaran | : | Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | Program | 1 | |
| | | | | | | | | | | Hasil | : | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|--|------|--|---|------|--|----------|--|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 76.204.000 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE | Dokumen | 1 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE | Dokumen | 1 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 457.199.912 |
| | | | | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 100% | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana | 100% | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 7.076.730 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 1 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan | 100% | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | Perangkat Daerah | 44 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | % | 61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7.076.730 |
| 3 | Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi | Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | 31% | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah | 100% | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota | 100% | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | - | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Orang | 68 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | % | 31 | |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | Masukan | : Jumlah dana yang dibutuhkan | (Rp) | 100.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | Keluaran | : Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan | Persentase | 34 | |
| | | | | | | | | | | | Hasil | : Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu | % | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 100.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9.924.317.996 |
| | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9.924.317.996 |

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh



ALIZAR, S.Ag., M.Hum
Pembina Utama Muda / 19691117 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE
jabatan : Wali Kota Banda Aceh

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

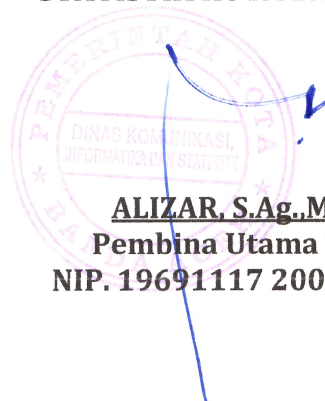
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 14 Februari 2025

Pihak Kedua
WALI KOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|----|--|-------------------|--|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi | 1 | Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu | Persentase | 31 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik | 2 | Persentase Website OPD yang Aktif | Persentase | 86 |
| | | 3 | Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan | Persentase | 61 |

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|--------|---|---------------|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8.435.945.852 | |
| 2 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 924.095.502 | Mendukung Indikator Persentase Website OPD yang Aktif |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 457.199.912 | Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 100.000.000 | Mendukung Indikator Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu |
| 5 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 7.076.730 | Mendukung Indikator Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan |
| Jumlah | | 9.924.317.996 | |

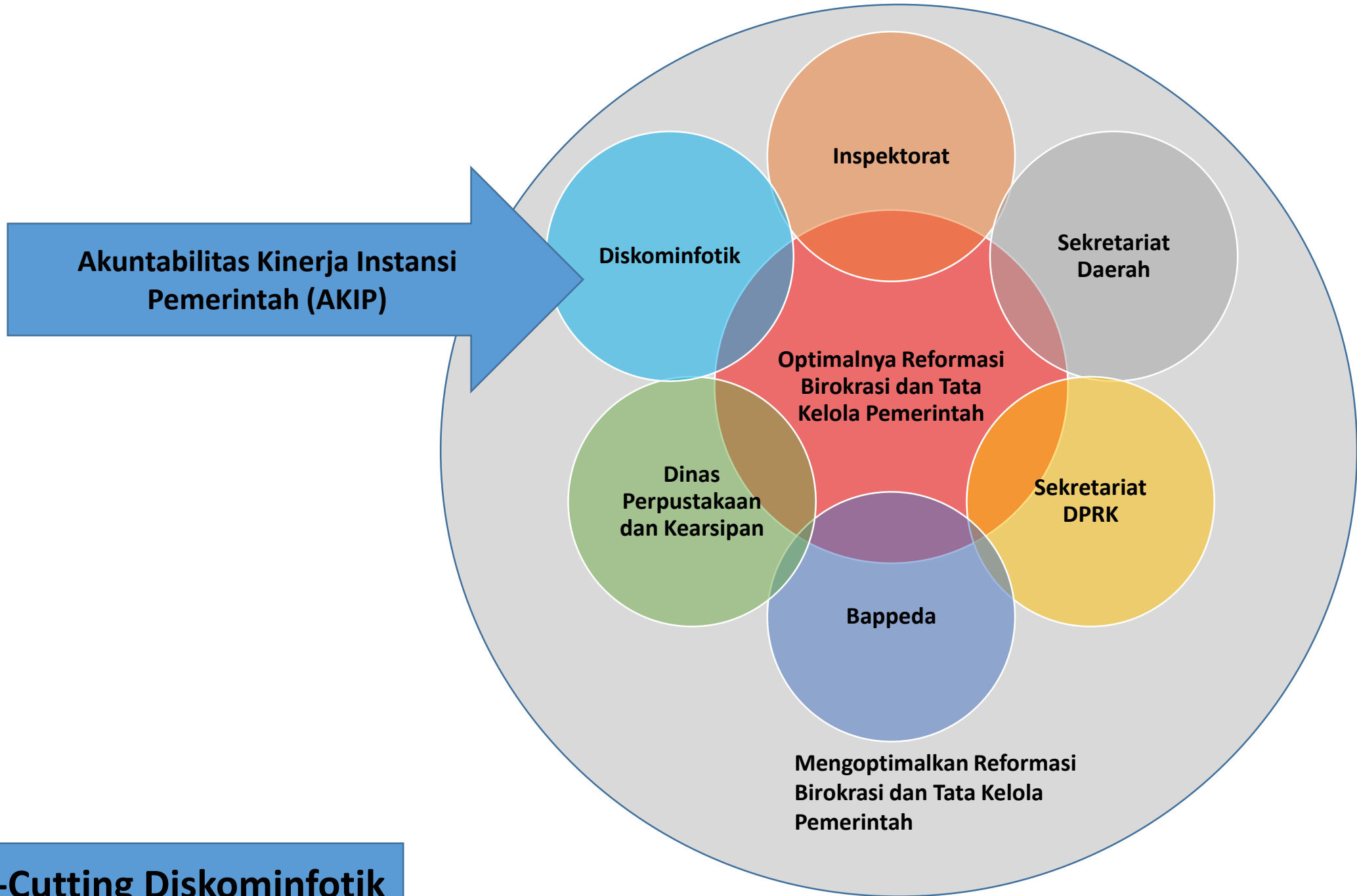
Banda Aceh, 14 Februari 2025

WALI KOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, SE

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

ALIZAR, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda / NIP.19691117 200112 1 002

| CASCADING KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Tujuan

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Strategi 1

Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas

Strategi 2

Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral

Strategi 3

Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi

Strategi 4

Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi

Strategi 1

Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral

Kebijakan 1

Melakukan pengembangan SDM terkait TIK

Kebijakan 2

Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik

Kebijakan 3

Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK

Kebijakan 4

Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi

Kebijakan 5

Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku

Sasaran 2

Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi

Strategi 1

Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral

Kebijakan 1

Pengembangan SDM terkait pengolahan data sektoral dengan jalan bimtek dan sosialisasi

Kebijakan 2

Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Cross-Cutting Diskominfo

Tujuan

Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

Sasaran 2

Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi

IKU 1

Persentase Website OPD yang Aktif

Program 1

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan 1

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Relasi Media

Sub Kegiatan
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik

Sub Kegiatan
Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Sub Kegiatan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

IKU 2

Cakupan Layanan e-Government yang Dilaksanakan

Program 2

Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan 2

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda

Sub Kegiatan
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Sub Kegiatan
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

Sub Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

Program 3

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan 3

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Kegiatan 4
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

IKU 3

Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Program 4

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan 5

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Cross-Cutting Diskominfo

| TUJUAN RPD | SASARAN RPD | IKU RPD | TUJUAN SKPD | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN SKPD | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah | Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh | Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi | Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik | Persentase website OPD yang aktif | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat | Relasi Media Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media |
| | | | | | | | | | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo |
| | | | | | | | | | Pelayanan Informasi Publik Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan |
| | | | | | | | | | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah |
| | | | | | | | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis |
| | | | | | | | | | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun |
| | | | | | | | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan |
| | | | | | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda |
| | | | | | | | | | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah |
| | | | | | | | | | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah |
| Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah | Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh | Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi | Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik | Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan e-government yang dikelola | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota |
| | | | | | | | | | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas |
| | | | | | | | | | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE |
| | | | | | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE |
| | | | | | | | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
| | | | | | | | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi |
| | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik |
| | | | | | | | | | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan |